

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang sebagian adalah wilayah pegunungan, seperti pegunungan Dieng. Kabupaten Banjarnegara kondisi alamnya mayoritas adalah perbukitan 70% dan 30% lainnya adalah dataran dan hal ini di perkirakan akan rawan untuk terjadinya bencana dan menurut BPBD Banjarnegara, 85% Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara rawan terjadi bencana (17 Kecamatan dari 20 Kecamatan di Banjarnegara).

Dengan melihat kondisi Daerah Banjarnegara yang rawan akan terjadinya bencana oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memetakan dan mencari informasi daerah-daerah yang rawan terhadap bencana di daerah banjarnegara. Karena secara fisik alam, kondisi Kabupaten Banjarnegara memang cukup berpotensi terjadinya bencana alam.

Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Banjarnegara meminta seluruh masyarakat agar waspada dan memperhatikan ancaman yang terdapat disekitar tempat tinggalnya sehingga badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten banjarnegara membentuk relawan search and rescue

(SAR) di tingkat desa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di kabupaten banjarnegara.

BPBD dalam merekrut anggota SAR yakni dari pemuda-pemuda desa yang nantinya akan mendapatkan pelatihan dasar SAR, sehingga mereka akan menjadi ujung tombak ketikan di daerah banjarnegara terjadi suatu bencana, pelatihan dasar SAR untuk tahap pertama ini diprioritaskan pada beberapa desa yang telah dalam kondisi rawan Selain melakukan penanggulangan para relawan SAR desa terlatih ini nantinya juga akan diminta untuk terus memberikan laporan pada BPBD. Bahkan, selanjutnya, ke depan para relawan SAR desa juga akan mendapatkan giliran piket di Sekretariat BPBD Banjarnegara guna menerima pengaduan dan cek lokasi jika terjadi laporan bencana kesiagaan SAR di setiap desa tersebut tidak lepas dari kondisi Banjarnegara yang 85% wilayahnya di nyatakan rawan terjadinya bencana sehingga perlu di lakukan pengawasan intensif pada empat desa yang telah terkena bencana dan 12 desa yang dinyatakan waspada. Adanya relawan SAR desa ini diharapkan mampu melakukan antisipasi korban jiwa saat bencana datang perekrutan relawan SAR desa dilakukan secara selektif sehingga pemuda yang direkrut mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam pencegahan korban jiwa saat terjadi bencana BPBD juga telah menjalin komunikasi dengan Tim SAR Kabupaten Banjarnegara serta relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga partai politik.¹

¹KP. jasin. 2011. artikel. Bentuk Relawan Sar Di Tingkat Desa. Kamis 10 november 2011

Dengan adanya relawan SAR desa, minimal mereka bertanggung jawab pada desanya masing-masing, dalam penanggulangan bencana pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi sehingga Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar lebih peduli dan mengenal lingkungan lebih baik agar dapat mengantisipasi terjadinya bencana. Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Banjarnegara, BPBD Provinsi mengharapkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih terfokus.

Dengan demikian masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dapat berperilaku lebih waspada dan tidak membangun bangunan yang dapat meningkatkan bahaya bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Untuk membuat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyarankan agar BPBD Kabupaten Banjarnegara terus melakukan penguatan kelembagaan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana baik dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan, pengaturan lereng tebing, dan perbaikan sistem drainase, Pemasangan salah satu daerah di kabupaten banjarnegara yang perlu di perhatikan dan perlunya adanya peningkatan pelatihan dasar SAR adalah wilayah dieng karena wilayah tersebut rawan terjadinya bencana.

Wilayah Dieng memang menyimpan potensi alam yang eksotik, pemandangan alam, hasil pertanian dan wisata. Wilayah Dieng dibagi menjadi

1. Kabupaten di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonorejo

Letaknya berada di sebelah Barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng juga merupakan kawasan Vulkanik aktif dan dapat dikatakan sebagai Gunung Api raksasa dengan beberapa kepundan Kawah. Ketinggian rata-rata adalah sekitar 2.000m di atas Permukaan laut. Suhu berkisar 15—20 °C di siang hari dan 10 °C di malam hari. Pada musim kemarau antara bulan Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 °C dipagi hari dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut *bun upas* (embun racun) karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian.²

Dieng juga terdapat beberapa kawah yang aktif itu terjadi akibat ledakan dari gunung berapi yang sehingga menjadi lubang-lubang yang mengeluarkan belerang yang disebut kawah, Kawah yang aktif di Dieng merupakan kepundan bagi aktivitas vulkanik dibawah dataran tinggi. Pemantauan Aktivitas dilakukan oleh PVMBG melalui Pos Pengamatan di desa Karangtengah, beberapa kawah yang tergolong aktif didataran tinggi Dieng yakni kawah Candradimuka, kawah Sibanteng, kawah Siglagah, kawah Sikendang, kawah Sikidang, kawah Sileri, kawah Sinila, kawah Timbang, tapi dari beberapa kawah di dataran tinggi dieng ada Kawah yang berpotensi mengandung Gas beracun, Kawah yang mengandung Gas beracun adalah Kawah Sikendang, Sinila dan Timbang.

Salah satu kawah yang baru mengalami ledakan dan mengeluarkan gas beracun yakni Kawah timbang. kawah timbang sendiri merupakan kawah yang masih di wilayah dieng dan dekat dengan kawah Sinila, kawah ini

²Wikipedia.org, http://www.wiikipedia.org/wiki/dataran_tinggi_dieng/kawah_timbang/Dieng.htm.

beraktivitas sedang Meskipun kurang aktif, kawah ini merupakan sumber gas CO² berkonsentrasi tinggi Kawah ini pernah mengalami erupsi pada tahun 1928 yang menelan korban jiwa 40 orang, terulang lagi tahun 1939 dengan korban jiwa 10 orang dan tahun 1979 memakan ratusan korban jiwa dengan kawah timbang salah satu kawah di dataran tinggi dieng yang telah memakan banyak korban dari pada kawah yang lainnya.

Kawah timbang terakhir tercatat mengalami kenaikan aktivitas pada 31 Mei 2011 dengan menyemburkan asap putih setinggi 20 meter, mengeluarkan CO² dalam konsentrasi melebihi ambang aman (1.000 ppm, konsentrasi normal di udara mendekati 400 ppm) dan memunculkan gempa vulkanik Akibatnya semua aktivitas dalam radius 1 km dilaranbg dan warga Dusun Simbar dan Dusun Serang diungsikan dan pada bulan juni tahun 2011 kawah timbang meledak pada ledakan ini kawah timbang mengeluarkan gas beracun tapi tidak memakan korban jiwa dan tidak ada kerusakan tanaman petani hanya rumput-rumput yang terkena gas beracun yang berada di sekitah kawah timbang sehingga petani tidak mengalami adanya kerugian.

Evakuasi dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan intruksi untuk mengevakuasi warga yang bermukim dalam radius satu kilometer dari Kawah Timbang. Evakuasi sesuai dari rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan pemerintah

Jarak Jauh Terakhir pemerintah Status Kawah Timbang masih dalam status

siaga atau level tiga. Dari kejauhan, terlihat kepulan asap gas beracun masih keluar dari pusat Kawah Timbang.³

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sejak tanggal 30 Mei 2011 menyatakan adanya Bencana Kawah Timbang dan memberlakukan masa tanggap darurat hingga 12 Juni 2011 dengan membentuk Posko Penanggulangan Bencana Alam di Rumah Dinas Camat Batur. Pada tanggal 10 Juni 2011 PVMBG menurunkan status Kawah Timbang dari siaga menjadi waspada dan memperbolehkan warga di pengungsian untuk kembali ke Rumah masing-masing. Tapi dengan demikian, PVMBG merekomendasikan agar ladang dalam radius 500 meter dari Kawah Timbang tetap dikosongkan karena konsentrasi CO² masih berbahaya bagi kehidupan. Selain itu, warga sekitar Kawah Timbang juga diminta untuk tidak menggali tanah dengan kedalaman lebih dari satu meter karena konsentrasi gas CO² di dalamnya cukup tinggi. Meskipun masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 12 Juni 2011, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperbolehkan para pengungsi kembali ke rumah masing-masing pada hari Sabtu 6 Juni 2011. Akan tetapi pelayanan Posko Penanggulangan Bencana Alam di Rumah Dinas Camat Batur diperpanjang hingga tanggal 14 Juni 2011.⁴

Dengan melihat latar belakang diatas bahwa Kabupaten Banjarnegara 85% wilayahnya merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana alam khususnya di daerah Dieng yang rawan akan terjadi bencana seperti tanah

³ Today.co.id, <http://www.today.co.id.ribuan.warga.dievakuasi.dari.kawah.timbang.taruna.siaga.bencana.indonesia.htm>.

⁴ Antaranews.com, <http://www.antaranews.com.posko.bencana.kawah.timbang.dieng.ditutup.htm>.

longsor dan ledakan gunung atau kawah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti. **“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM MANAJEMEN BENCANA ALAM TAHUN 2011 “ (studi kasus bencana alam gas beracun di kawah timbang tahun 2011).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis akan mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam manajemen bencana alam gas beracun di Kawah Timbang tahun 2011?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam Manajemen Bencana alam di Kawah Timbang tahun 2011?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan secara teoritis

- i. Diharapkan dengan pemahaman manajemen organisasi sehingga dapat memahami realitas sosial di masa depan.

- ii. Dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

keberhasilan dalam manajemen bencana alam gas beracun di

b. Tujuan secara praktis

- i. Untuk Mengetahui seberapa besar kinerja Pemerintah Daerah dalam manajemen Bencana alam gas beracun di Kawah Timbang tahun 2011.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

- i. Memperluas pengetahuan peneliti dalam masalah manajemen bencana alam gas beracun di Kawah Timbang tahun 2011.
- ii. Memberi kontribusi terhadap ilmu yang telah didapat dibangku kuliah, khususnya tentang kinerja pemerintah terhadap manajemen bencana alam.
- iii. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dalam judul ini.

b. Manfaat secara praktis

- i. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah kualitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam manajemen bencana alam gas beracun di Kawah Timbang.
- ii. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada aparatur kantor pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam manajemen bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

- iii. Mengetahui kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam manajemen bencana alam gas beracun di Kawah Timbang tahun 2011.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Teori pada dasarnya adalah sarana untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun fenomena ilmiah yang hendak di teliti. Beberapa definisi teori yang di kemukakan oleh para tokoh: teori menurut Masri Singarimbun adalah sebagai berikut:

“Teori itu merupakan serangkaian asumsi konsep, abstrak, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya.⁵

Menurut Koentjaraningrat yang menyatakan :

“Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat“⁶

Dalam menjabarkan suatu teori harus diperhatikan komponen-komponennya. Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Teori harus memiliki subyek yang dipermasalahkan
2. Teori harus mencerminkan variabelnya
3. Teori harus memiliki tertib logika

⁵ Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.4.

⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT, Gramedia, Jakarta, 1981.

4. Teori harus dapat menentukan dengan alat apa hubungan tersebut harus diukur atau dengan kata lain dengan metode apa penelitian itu di lakukan.

Dari berbagai uraian diatas, jelaslah kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel yang di dasarkan pada konsep dan definisi tertentu.

Teori merupakan penjelasan yang sistematis dari variabel-variabel dalam penelitian, yang selanjutnya akan di kaji, dibahas dan dianalisa permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar didapatkan pemecahannya atas masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini penyusun berorientasi pada kinerja manajemen bencana alam di Kabupaten Banjarnegara, sehingga gagasan yang digunakan sebagai sarana pemecahan masalah bagaimana kinerja manajemen bencana di Kabupaten Banjarnegara.

1. PEMERINTAH DAERAH

a. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk itu pembentukan pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, wilayah daerah, luas daerah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemberian kedudukan propinsi sebagai daerah otonomi dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
- b. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik di daerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas-asas dekonsentrasi.

Pembagian daerah menurut UU. No. 32 tahun 2004 yang menjadi pertimbangan adalah :

- a. Faktor kemampuan ekonomi
- b. Faktor potensi daerah
- c. Faktor luas daerah
- d. Faktor kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan di berikannya otonomi daerah.

Daerah di bentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota, daerah di bentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan asas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

- a. Daerah provinsi

Daerah provinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai kearah laut.

b. Daerah kabupaten dan daerah kota

Daerah kabupaten dan kota bersifat otonom yaitu yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

c. Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan menurut undang-undang tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi dan menurut undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten dan kota.

d. Kelurahan atau desa

Kelurahan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dibawah kecamatan, kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.⁸

⁸ Dedi Supriyadi, Brata Kusuma, Phd, Padang Solihin, MA. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 13

b. Ciri-ciri pemerintah daerah

Menurut Oppenheim memberikan beberapa ciri Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara;
2. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar sdibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya;
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu;
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

2. KINERJA ORGANISASI

a. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance*) dapat di definisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “ *the degree of accomplishment*” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (keban 2000). Semakin tinggi kinerja organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.⁹

⁹ Hani Nani S. Tambilias, *manajemen modern untuk sektor publik*. Pekanbaru dan Co

Menurut Sumamur adalah sebagai berikut :

“kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok personel.”

Menurut Yusuf yang menyatakan bahwa:

“penilaian kerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk memperbaiki unjuk kerja personel dalam organisasi.”

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Sumamur (2001) faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja personel adalah :

a. Karakteristik pribadi, baik karakteristik yang dapat diubah seperti pengetahuan dan sikap maupun karakteristik yang tidak dapat dirubah

seperti umur, jenis kelamin, lama kerja, dan pendidikan

- b. Motivasi
- c. Pendapatan dan gaji
- d. Keluarga
- e. Organisasi
- f. Supervisi
- g. Pengembangan karir

Sedangkan menurut Gibson et al. (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku seseorang adalah:

- a. Faktor individual yang meliputi: kemampuan, latar belakang, dan demografi
- b. Faktor organisasi meliputi: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan
- c. Faktor psikologis meliputi: persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi.¹⁰

c. Pengertian organisasi

Menurut Chester I. Bernard “Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.” “Organisasi adalah suatu wadah atau pun tempat dimana orang-orang dapat bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi kita akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan suatu kerja sama, karena

setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah organisasi tersebut.”

Sedangkan menurut Cyrill Soffer “adalah perserikatan orang-orang yang masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas dibagikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung dalam beberapa bentuk hasil.”

Menurut: Ernest Dale “Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok”.¹¹

d. Ciri –ciri organisasi

- a. Adanya komponen (atasan dan bawahan)
- b. Adanya kerja sama (cooperative yang berstruktur dari sekelompok orang)
- c. Adanya tujuan
- d. Adanya sasaran
- e. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
- f. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

e. Unsur-unsur organisasi

- a. Manusia(man): dalam keorganisasian, manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi tersebut yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari

¹¹ Kast & Rosenzweig, teori organisasi. Artikel.

pimpinan(administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, manajer yang memimpin tiap-tiap satuan unit kerja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan para pekerja.

- b. Kerjasama (team work): suatu kegiatan bantu-membantu antar sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. oleh karena itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi, tugas dan tingkatannya masing-masing.
- c. Tujuan bersama: adalah arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi. Setiap anggota sebuah organisasi harus mempunyai tujuan yang sama agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.
- d. Peralatan (equipment): segala sesuatu yang digunakan dalam organisasi seperti uang, kendaraan, gedung, tanah dan barang modal lainnya.
- e. Lingkungan (enviroment): yang termasuk kedalam unsur lingkungan adalah kondisi atau situasi, tempat atau lokasi, wilayah operasi, kekayaan alam

f. Pengertian kinerja organisasi

Kinerja organisasi dapat diartikan seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penilaian tersebut, juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan kualitas organisasi. Pengukuran kinerja aktivitas di rancang untuk menilai aktivitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Responsivitas

Aspek responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi tuntutan customers.

2. Aspek Responsibilitas (*Responsibility*)

Aspek Responsibilitas mencakup kesesuaian pelaksanaan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip baik secara implisit maupun eksplisit. Dalam aspek ini kinerja organisasi publik dinilai semakin baik

apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi.

3. Aspek Profesionalisme

Aspek Profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio atau input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *general accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

5. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*)

Aspek ini diartikan sebagai pertanggung jawaban dari para aparat tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas tersebut adalah

meleaksanakan rapat koordinasi serta evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang atau yang telah dilakukan oleh organisasi, karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan kualitas.¹²

3. MANAJEMEN BENCANA ALAM

a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua urusan atau kegiatan akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.

¹² Ulung Pribadi, "Perubahan Paradigma Organisasi, Perencanaan Strategis, Manajemen Total Kualitas Dalam Pengembangan Organisasi"(Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi) Jember, Jember: Pustaka, 2010. Jember: Jember: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

b. Fungsi utama dari manajemen

1. Manajemen administratif yakni lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudia perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan.
2. Manajemen operatif yakni lebih mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif.

Pada tingkatan manajemen rendah, para manajer akan banyak melaksanakan fungsi manajemen operatif dan semakin tinggi tingkatannya mereka lebih terlibat dengan manajemen administratif.

Fungsi lain manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Rencana di butuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu rencana memungkinkan:

- i. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.

- ii. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

bersifat dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih

iii. Kemajuan dapat terus di monitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Semua fungsi manajemen lainnya sangat tergantung pada fungsi *planning*, dimana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah 1) penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan. 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudia. 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk meleksanakan tugas-tugasnya .fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dikoordinasikan.

3. Penyusunan personal (*Staffing*)

Adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, phisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan dikrinsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik

karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personal tertentu.

4. Pengarahan (*Leading*)

Pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, harus mereka lakukan, fungsi ini melibatkan kualitas, yaga, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin.

5. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan ini adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu : 1) penetapan standar pelaksanaan. 2) penentuan ukura-ukuran pelaksanaan. 3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. 4.) pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, mengintepretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personal, pengarahan dan pengawasan. Dan sebuah kegiatan atau usaha tanpa adanya penggunaan fungsi manajemen tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

c. Pengertian Bencana Alam

Kata bencana dalam Bahasa Inggris "*disaster*" berasal dari kata Bahasa Latin "*dis*" yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan "*aster*" yang bermakna "dari bintang-bintang. Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.

Sejak zaman dulu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi mereka. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan dewa-dewa. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran.¹⁴

Bencana adalah Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Bencana Alam adalah sebagai sesuatu yang tidak bisa di hindari dan harus terjadi. gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, gas

¹⁴ ¹⁴Wikipedia.org, http://www.wiikipedia.org/wiki/bencana_alam/pengertian_dalam_kebudayaan

beracun dan lainnya. Ini adalah sebuah fenomena yang sudah melekat di bumi sampai sekarang manusia belum bisa untuk mengatasi munculnya bahaya itu, bencana merupakan sebuah konstruksi sosial dimana bencana ini adalah bertemunya sebuah ancaman yang berupa fenomena alam atau buatan, bencana akan terjadi apabila masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan atau kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan ancaman yang mungkin terjadi padanya.¹⁵

Menurut UU 24 2007 ada tiga jenis bencana yakni bencana alam, non-alam dan bencana sosial.

1. Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat.¹⁶

¹⁵ Ir.G.fajar suryono yang berjudul "sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai alternatif upaya penanggulangan bencana, geologi UGM, 2005. Makalah, Hal 2

¹⁶ Ir.G.fajar suryono yang berjudul "sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai alternatif upaya penanggulangan bencana, geologi UGM, 2005. Makalah, Hal 2

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.¹⁷

Manusia dianggap tidak berdaya pada bencana alam, bahkan sejak awal peradabannya. Ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan, struktural dan korban jiwa. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari bencana serta daya tahannya. Bencana muncul bila bertemu dengan ketidakberdayaan. Artinya adalah aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat.

d. Pengertian Manajemen Bencana Alam

Banyak peristiwa bencana yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar di Indonesia. Namun selama ini manajemen bencana kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, padahal kita hidup di salah satu wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen bencana perlu

dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Manajemen bencana sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang menyangkut seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa. (2) mengurangi penderitaan manusia. (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomi.

Bidang ilmu ini berhubungan dengan persiapan sebelum terjadi bencana, tanggap bencana (misalnya. evakuasi gawat darurat, karantina, dekontaminasi massa, dll) serta mendukung dan membangun kembali masyarakat setelah bencana alam atau bencana buatan manusia terjadi. ¹⁸

Jadi manajemen gawat darurat merupakan proses berkelanjutan dimana semua individu, kelompok dan komunitas mengelola risiko dalam usaha untuk menghindari atau memperbaiki akibat bencana yang merupakan hasil dari risiko.

Manajemen bencana adalah Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Manajemen Bencana: serangkaian upaya komprehensif dalam pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana. Kegiatan dalam pra bencana

ditujukan untuk mengurangi resiko bencana, bersifat preventif seperti : Pencegahan dan Mitigasi atau penjinakan sedangkan dalam Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan Saat bencana (tanggap darurat) yakni: Pengakajian darurat Rencana operasi, Tanggap darurat dan Setelah bencana, Rehabilitatif dan Rekonstruktif.

Adapun pendapat lain tentang manajemen bencana alam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya).
2. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, bentuk mitigasi:
 - i. Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa, dll.)
 - ii. Mitigasi non-struktural (peraturan perundang-undangan, pelatihan, dll.)
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kertiniansi dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan

4. Tanggap Darurat (*response*) adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.
5. Bantuan darurat adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal, Sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
6. Pemulihan (*recovery*) adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula.
7. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
8. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.¹⁹

Manajemen Bencana tidak hanya bersifat reaktif : baru melakukan setelah terjadi bencana. Tetapi manajemen bencana juga bisa bersifat antisipatif, melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana, bencana menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan, hal ini akan menyebabkan angka kemiskinan disuatu wilayah yang terkena bencana akan meningkat. Hal inilah yang coba diantisipasi. Informasi yang bermanfaat bagi penanggulangan bencana tidak hanya berupa peta atau kondisi geografis yang rentan terkena bencana alam, tetapi juga potensi non fisik seperti kesenjangan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Data-data dan hasil penerapan siklus sebenarnya berisi potensi-potensi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bencana, misalnya pengetahuan tentang system informasi dan komunikasi, yang bisa digunakan untuk secara cepat menginformasikan terjadinya bencana, atau berdirinya BKM/LKM sebagai salah satu lembaga local yang bisa berperan dalam pengoordinasian tindakan tanggap darurat bencana.²⁰

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konsepsional yaitu suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Adapun pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah:

1. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

²⁰ Achmad lutfi, *cara pencegahan dan penanggulangan bahan pencemaran tanah*, artikel

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Manajemen Bencana adalah tindakan atau upaya yang di lakukan untuk mencegah bencana baik sudah terjadi atau belum terjadi.
4. Bencana adalah peristiwa / rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.
5. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable.²¹

➤ Indikator- indikator manajemen bencana yakni antarlain sebagi berikut:

1. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya).
2. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, bentuk mitigasi :
 - i. Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa, dll.)
 - ii. Mitigasi non-struktural (peraturan perundang-undangan, pelatihan, dll.)
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana.
4. Tanggap Darurat (*response*) adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang

5. Bantuan darurat adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal, Sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
 6. Pemulihan (*recovery*) adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula.
 7. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
 8. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.²²
- Indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam manajemen bencana.
1. Komunikasi, sebagai upaya penyampaian suatu pesan Komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu terhadap Komunikan. Dalam Implementasi Kebijakan Komunikasi difungsikan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana ataupun penyampaian pesan dari Pemerintah ke pada Publik.

2. Sumber Daya, dukungan sumber daya sangat diperlukan untuk Implementasi Kebijakan. Dimana sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana Kebijakan ataupun sumber dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan yang mutlak diperlukan.
3. Sikap pelaksana, sikap dari pelaksana ikut menentukan terlaksananya atau tidaknya suatu kebijakan mengingat peranannya sebagai implementor sehingga kemampuan dari aparat pelaksana perlu di tingkatkan sehingga keberhasilan kebijakan dapat lebih mudah tercapai.
4. Organisasi pelaksana, sebagai wadah untuk menjalankan dan mengkoordinasikan setiap pelaksana dan jalan atau tindakannya suatu kebijakan.²³

➤ Indikator untuk menilai sebuah Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dinilai dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Responsivitas

Aspek responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat

²³ Ibid: hal 47

dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi tuntutan customers.

2. Aspek Responsibilitas (*Responsibility*)

Aspek Responsibilitas mencakup kesesuaian pelaksanaan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip baik secara implisit maupun eksplisit. Dalam aspek ini, kinerja organisasi publik dinilai semakin baik apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi.

3. Aspek Profesionalisme

Aspek Profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakintumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio atau input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *general accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan

konsep produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seherana

besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

5. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*)

Aspek ini diartikan sebagai pertanggung jawaban dari para aparat tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan. Salah satu cara untuk mengukur akuntabilitas tersebut adalah meleksanakan rapat koordinasi serta evaluasi dari setiap kegiatan yang sedang atau yang telah dilakukan oleh organisasi, karena hal tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi organisasi dalam melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan kualitas.²⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode deskriptif atau analisa kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek wisata, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara

²⁴ Ulung Pribadi, "Perubahan Paradigma Organisasi, Perencanaan Strategis, Manajemen Total Kualitas Dalam Pengembangan Organisasi" (Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi)

sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di kantor pemerintah daerah kabupaten banjarnegara dengan alasan karena pemerintah daerah mempunyai peran terhadap manajemen bencana yang ada di kabupaten banjarnegara. Khususnya bencana alam gas beracun di kawah timbang tahun 2011 karena saat bencana alam di kawah terjadi BPBD belum di bentuk.

3. Jenis Data

Data merupakan unsur pokok yang harus ada dalam penelitian, dalam melakukan penelitian digunakan 2 jenis data yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan berupa keterangan yang diberikan oleh pihak yang terkait dengan masalah yang ada. Dalam skripsi ini data yang di peroleh dengan data primer yakni dengan wawancara dengan salah satu aparatur DBPD Kabupaten Banjarnegara Bapak Idrus pada tanggal 28 desember 2011.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lokasi dengan pengamatan dan dari pencatatan dokumen.

Dalam skripsi ini data yang diperoleh dengan data sekunder yakni berupa

diktat yang berjudul rencana kontinjensi Kabupaten Banjarnegara menghadapi ancaman bencana gas beracun gunung dieng.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menuju kebenaran hepotesis diperlukan data yang obyektif.

Adapun data yang di peroleh dengan cara :

a. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan mengutip data yang diperlukan penulis yang tersedia di kantor pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yakni berupa diktat tentang rencana kontinjensi Kabupaten Banjarnegara menghadapi ancaman bencana gas beracun gunung Dieng.

b. Wawancara

Adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden, wawancara di lakuka dengan Bapak Idrus salah satu aparatur BPBD Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 desember 2011 di kantor BPBD Kabupaten Banjarnegara.

c. Kuesioner.

Adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk di isi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan (respon) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Batur. Kuesionner dalam penelitian ini

yaitu dengan penyebaran 30 kuesioner untuk 30 responden yang disebar di kecamatan Batur.

5. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan itu berupa data studi kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

Dengan menggunakan teknis analisis data yang didapat didalam penelitian (lapangan) tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur/langkah dalam pengumpulan data kali ini sampai pada pengambilan generalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data atau informasi di lapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif atau kuantitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh dilapangan.
- c. Menyusun klasifikasi informasi yang didalam data yang diperoleh.
- d. Mendeskripsikan sekaligus menganalisis dan menginterpretasikan.
- e. Mengambil kesimpulan.²⁵